



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SLAMET JAKA MULYANA, S.H., M.H.
Jabatan : ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RIONO BUDISANTOSO, S.H., M.A.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, September 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


(RIONO BUDISANTOSO, S.H., M.A.)

Pihak Pertama,

ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM,


(SLAMET JAKA MULYANA, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif di wilayah Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta	90%
2	Meningkatnya kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Pra-Penuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta	90%
		Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Penuntutan di wilayah Kejaksaan	90%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Tinggi D.I. Yogyakarta	
		Persentase perkara tindak pidana umum yang <i>in kracht van gewusjdezaak</i> (Berkekuatan hukum tetap) yang telah dieksekusi di wilayah Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta	90%
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	A

No	Rincian Output	Anggaran
1	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 350.000.000
2	Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 70.500.000
	Jumlah	Rp. 420.500.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Yogyakarta, September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

(RIONO BUDISANTOSO, S.H., M.A.)

ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM,


(SLAMET JAKA MULYANA, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD ANSHAR WAHYUDDIN, S.H., M.H.
Jabatan : ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RIONO BUDISANTOSO, S.H., M.A.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, September 2025

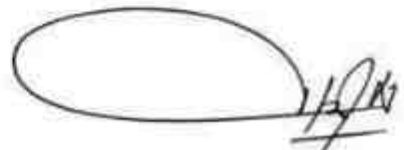
Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


(RIONO BUDISANTOSO, S.H., M.A.)

Pihak Pertama,

ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS,


(MUHAMMAD ANSHAR WAHYUDDIN, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase tindak lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat di wilayah Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta	85%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan di wilayah Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta	80%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan	80%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		pada tahap penyidikan di wilayah Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta	
		Persentase Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta	80%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta	80%
		Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi di wilayah Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta	80%
		Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus di wilayah Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta	80%
2	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta	80%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta	80%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi di wilayah Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta	80%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 60.000.000
2	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 184.164.000

3	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 515.000.000
4	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Tinggi	Rp. 185.400.000
Jumlah		Rp. 944.564.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.


Yogyakarta, September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

(RIONO BUDISANTOSO, S.H., M.A.)

ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS,

(MUHAMMAD ANSHAR WAHYUDDIN, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGUS RUJITO, S.H., M.H.
Jabatan : ASISTEN INTELIJEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RIONO BUDISANTOSO, S.H., M.A.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta , September 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


(RIONO BUDISANTOSO, S.H., M.A.)

Pihak Pertama,

ASISTEN INTELIJEN,


(AGUS RUJITO, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	85%
2	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	85%
3	Meningkatnya pelaksanaan	Persentase pelaksanaan Operasi	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	85%
4	Meningkatnya kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	85%
5	Meningkatnya operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	85%
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum	Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	85%
7	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	A "Sangat Baik"

No	Rincian Output	Anggaran
1	Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	Rp. 80.000.000
2	Kegiatan / Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 60.000.000
3	Kegiatan / Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	Rp. 60.000.000
4	Kegiatan Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri	Rp. 72.500.000
5	Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 58.008.000
6	Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/	Rp. 75.000.000
7	Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 30.000.000
8	Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 77.952.000

9	Pelayanan Media dan Kehumasan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 18.000.000
10	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 84.800.000
Jumlah		Rp. 616.260.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Yogyakarta , September 2025

Pihak Kedua,


KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

(RIONO BUDISANTOSO, S.H., M.A)

Pihak Pertama,

ASISTEN INTELIJEN,

(AGUS RUJITO, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARIF RAHARJO, S.H., M.H.
Jabatan : ASISTEN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RIONO BUDISANTOSO, S.H., M.A.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, September 2025


Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

(RIONO BUDISANTOSO, S.H. M.A.)

ASISTEN PERDATA DAN TATA USAHA
NEGARA,


(ARIF RAHARJO, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Litigasi di wilayah Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta	85%
		Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Non Litigasi di wilayah Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta	85%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui jalur Litigasi di wilayah Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta	85%
2	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata	Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata di wilayah Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta	85%
3	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain di wilayah Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta	24
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum perdata dan tata usaha negara	A

No	Rincian Output	Anggaran
1	Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 35.000.000
2	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 60.000.000
3	Pertimbangan Hukum/ Pendampingan Hukum/ Bantuan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	Rp. 30.000.000
4	Pengelolaan Halo JPN di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	Rp. 9.600.000
5	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	Rp. 9.600.000
Jumlah		Rp. 144.200.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Yogyakarta, September 2025

Pihak Kedua,


KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



(RIONO BUDISANTOSO)

Pihak Pertama,

ASISTEN PERDATA DAN TATA USAHA
NEGARA,



(ARIF RAHARJO, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AMDY RIFANIE, S.H., M.H.
Jabatan : ASISTEN PIDANA MILITER

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RIONO BUDISANTOSO, S.H., M.A.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, September 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


(RIONO BUDISANTOSO, S.H., M.A.)

Pihak Pertama,

ASISTEN PIDANA MILITER,


(AMDY RIFANIE, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN PIDANA MILITER KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kegiatan Koordinasi teknis Penuntutan yang dilakukan Oditurat	Jumlah kegiatan Koordinasi Teknis (<i>Assurance, Consultative, Pencegahan Fraud, Monev dan Pelaporan</i>) Tahap Penindakan	6
		Jumlah kegiatan Koordinasi Teknis (<i>Assurance, Consultative, Pencegahan Fraud, Monev dan Pelaporan</i>) Tahap Penuntutan	6

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Jumlah kegiatan Koordinasi Teknis (<i>Assurance, Consultative, Pencegahan Fraud, Monev dan Pelaporan</i>) Tahap Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi	6
2	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara koneksitas (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi, upaya hukum, dan barang bukti)	Persentase perkara koneksitas yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	80%
		Persentase perkara koneksitas yang diselesaikan pada tahap penyidikan	80%
		Persentase perkara koneksitas yang diselesaikan pada tahap penuntutan	80%
		Persentase pelaksanaan putusan hakim perkara koneksitas yang telah dieksekusi	80%
		Persentase pengembalian kerugian negara perkara koneksitas	80%
3	Meningkatkan kepuasan relasi kelembagaan dilingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya terhadap layanan hukum berupa koordinasi teknis perkara oditurat dan Penanganan Perkara Koneksitas	Indeks kepuasan relasi kelembagaan terhadap layanan hukum bidang pidana militer (Sosialisasi kelembagaan, konsolidasi dan sinkronisasi/kolaborasi)	65%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	Rp. 30.000.000
2	Penyelidikan Perkara Koneksitas	Rp. 30.694.000
3	Penyidikan Perkara Koneksitas	Rp. 103.000.000
4	Pra Penuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	Rp. 90.000.000
5	Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	Rp. 4.000.000
7	Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Pidana Militer di Kejaksaan Tinggi	Rp. 71.000.000
8	Koordinasi Penindakan/ Penuntutan/ Eksekusi Perkara Koneksitas	Rp. 12.000.000

Jumlah	Rp. 340.694.000
--------	-----------------

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Yogyakarta, September 2025

Pihak Kedua,


KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

(RIONO BUDISANTOSO, S.H., M.A.)

Pihak Pertama,

ASISTEN PIDANA MILITER,


(AMDY RIFANIE, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ROMLAN ROBIN, S.H., M.H.
Jabatan : ASISTEN PENGAWASAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RIONO BUDISANTOSO, S.H., M.A.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


(RIONO BUDISANTOSO, S.H., M.A.)

Pihak Pertama,

ASISTEN PENGAWASAN,


(ROMLAN ROBIN, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI	Persentase Satuan Kerja di Wilayah Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta yang memperoleh predikat AKIP minimal A	80%
2	Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan RI	Jumlah ASN di wilayah Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta yang dijatuhi hukuman disiplin	7
3	Terselenggaranya Kejaksaan RI sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah	Persentase satker yang ditetapkan sebagai Satker WBK/WBBM	80%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)		

No	Rincian Output	Anggaran
1	Pelaksanaan Inspeksi Umum, Pemantauan dan Audit Reviu	RP. 140.000.000
2	Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti melalui Klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 34.400.000
3	Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti melalui Inspeksi Kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 40.520.000
4	Audit Perhitungan Kerugian Negara yang dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 30.000.000
Jumlah		Rp. 314.920.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Yogyakarta, Januari 2025


Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

(RIONO BUDISANTOSO, S.H., M.A.)



Pihak Pertama,

ASISTEN PENGAWASAN,

(ROMLAN ROBIN, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PRIATMAJI DUTANING PRAWIRO, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA BAGIAN TATA USAHA KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RIONO BUDISANTOSO, S.H., M.A.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, September 2025,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

KEPALA BAGIAN TATA USAHA
KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA


(RIONO BUDISANTOSO, S.H., M.A.)


(PRIATMAJI DUTANING PRAWIRO, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BAGIAN TATA USAHA
KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

Kepala Bagian Tata Usaha Menyelenggarakan Fungsi:

1. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program;
2. penerimaan, pencatatan, mengagendakan, pendistribusian dan penyajian surat serta dokumen;
3. penyusunan, penyimpanan, penyajian pengetikan, pengadaan dan pemeliharaan arsip serta penyusunan laporan;
4. pelaksanaan urusan ketatausahaan kepada satuan kerja;
5. pelaksanaan urusan protokol, upacara, rapat dan pertemuan; dan

6. pembinaan urusan keamanan dan ketertiban, tata tertib dalam lingkungan kantor dan tempat kediaman Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi.

D. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



(RIONO BUDISANTOSO, S.H., M.A.)

Yogyakarta, September 2025,

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN TATA USAHA
KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA

(PRIATMAJI DUTANING PRAWIRO, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RINI TRININGSIH, S.H., M.Hum.
Jabatan : ASISTEN PEMBINAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RIONO BUDISANTOSO, S.H., M.A.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ASISTEN PEMBINAAN,

(RIONO BUDISANTOSO, S.H., M.A.)

(RINI TRININGSIH, S.H., M.Hum.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN PEMBINAAN KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran kejaksaan RI	Persentase satuan Kerja di wilayah Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal	85%
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95%
2	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	Jumlah Satker di wilayah Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta yang ditetapkan sebagai Satker WBK/WBBM	6

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI	Persentase sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan di wilayah Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta	85%
4	Meningkatnya tertib penyelenggaraan tata kelola aset	Persentase satuan kerja yang telah melaksanakan inventarisasi BMN di wilayah Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta	85%
5	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum	Persentase kepuasan terhadap layanan hukum dari masing-masing Satker	90%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Layanan Perkantoran	Rp. 76.019.173.000
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 7.178.500.000
	Jumlah	Rp. 83.197.673.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Yogyakarta, September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ASISTEN PEMBINAAN,



(RIONO BUDISANTOSO, S.H. M.A.)

(RINI TRININGSIH, S.H., M.Hum.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BAMBANG SETIAWAN., S.H., M.H.Li.
Jabatan : KOORDINATOR PADA KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RIONO BUDISANTOSO, S.H., M.A.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, September 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


(RIONO BUDISANTOSO, S.H., M.A.)

Pihak Pertama,

KOORDINATOR
KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA


(BAMBANG SETIAWAN., S.H., M.H.Li.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOORDINATOR
KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyeiarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. Kinerja Utama

1. Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
2. Melakukan Kajian Teknis dan dukungan pemikiran.
3. Mengkoordinasikan Jaksa dalam melaksanakan operasi intelijen penegakan hukum, penyelesaian perkara pidana umum, pidana khusus, perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan, koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas, serta melaksanakan kegiatan pemulihan aset.

Yogyakarta, September 2025,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

KOORDINATOR
KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA



(RIONO BUDISANTOSO, S.H., M.A.)

(BAMBANG SETIAWAN., S.H., M.H.Li.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. ANI FITRIA, S.H., M.H.
Jabatan : KOORDINATOR PADA KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RIONO BUDISANTOSO, S.H., M.A.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, September 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

(RIONO BUDISANTOSO, S.H., M.A.)

Pihak Pertama,

KOORDINATOR
KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA

(Dr. ANI FITRIA, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOORDINATOR
KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. Kinerja Utama

1. Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
2. Melakukan Kajian Teknis dan dukungan pemikiran.
3. Mengkoordinasikan Jaksa dalam melaksanakan operasi intelijen penegakan hukum, penyelesaian perkara pidana umum, pidana khusus, perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan, koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas, serta melaksanakan kegiatan pemulihan aset.

Yogyakarta, September 2025,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

**KOORDINATOR
KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA**


(RIONO BUDISANTOSO, S.H., M.A.)


(Dr. ANI FITRIA, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LUTVI TRI CAHYANTO, S.H., M.H.
Jabatan : KOORDINATOR PADA KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RIONO BUDISANTOSO, S.H., M.A.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, September 2025,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

(RIONO BUDISANTOSO, S.H., M.A.)

KOORDINATOR
KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA

(LUTVI TRI CAHYANTO, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOORDINATOR
KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. Kinerja Utama

1. Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
2. Melakukan Kajian Teknis dan dukungan pemikiran.
3. Mengkoordinasikan Jaksa dalam melaksanakan operasi intelijen penegakan hukum, penyelesaian perkara pidana umum, pidana khusus, perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan, koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas, serta melaksanakan kegiatan pemulihan aset.

Yogyakarta, September 2025,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

(RIONO BUDISANTOSO, S.H., M.A.)

KOORDINATOR
KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA

(LUTVI TRI CAHYANTO, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SHINTA AYU DEWI RR, S.H., M.H.
Jabatan : KOORDINATOR PADA KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RIONO BUDISANTOSO, S.H., M.A.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, September 2025,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

KOORDINATOR
KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA

(RIONO BUDISANTOSO, S.H., M.A.)

(SHINTA AYU DEWI RR, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOORDINATOR
KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. Kinerja Utama

1. Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
2. Melakukan Kajian Teknis dan dukungan pemikiran.
3. Mengkoordinasikan Jaksa dalam melaksanakan operasi intelijen penegakan hukum, penyelesaian perkara pidana umum, pidana khusus, perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan, koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas, serta melaksanakan kegiatan pemulihan aset.

Yogyakarta, September 2025,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

(RIONO BUDISANTOSO, S.H., M.A.)

KOORDINATOR
KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA

(SHINTA AYU DEWI RR, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SOEKESTO ARIESTO, S.H., M.H.
Jabatan : KOORDINATOR PADA KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RIONO BUDISANTOSO, S.H., M.A.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, September 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

(RIONO BUDISANTOSO, S.H., M.A.)

Pihak Pertama,

KOORDINATOR
KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA

(SOEKESTO ARIESTO, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOORDINATOR
KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. Kinerja Utama

1. Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
2. Melakukan Kajian Teknis dan dukungan pemikiran.
3. Mengkoordinasikan Jaksa dalam melaksanakan operasi intelijen penegakan hukum, penyelesaian perkara pidana umum, pidana khusus, perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan, koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas, serta melaksanakan kegiatan pemulihan aset.

Yogyakarta, September 2025,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

**KOORDINATOR
KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA**



(RIGNO BUDISANTOSO, S.H., M.A.)

(SOEKESTO ARIESTO, S.H., M.H.)